

2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP) TAHUN 2019

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN
DEMAK**

Jl. Sultan Hadiwijaya No.44 Demak Telp/fax.0291.685934
website : www.dinkes.demakkab.go.id
email : dinkes@dinkes.demakkab.go.id



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

DINAS KESEHATAN KABUPATEN DMAK
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

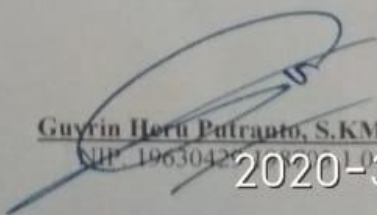
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2019. LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kesehatan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Kesehatan .

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini disusun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Demak, Januari 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK


Guyrin Heru Putranto, S.KM., MM
NIP. 19630422199001005

2020-3-26 08:34

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra Kabupaten Demak merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 - 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 1 (satu) pernyataan Misi yang diemban, 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2021. Sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk Tahun 2019 terdapat 5 indikator sasaran, 15 kebijakan, 4 program rutin dan 15 program wajib pelayanan dasar bidang kesehatan, 70 kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan. Anggaran DPA-SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019 yang tersedia sebesar Rp 121.843.251.523,- Yang terdiri belanja tidak langsung Rp. 4.705.649.313,- dan belanja langsung Rp. 117.137.602.210,- sedangkan anggaran untuk Puskesmas sebesar Rp. 151.129.403.771 terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 69.139.498.045,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 81.989.905.726,-

Pencapaian Sasaran

Nilai Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari lima indikator sebelum perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dan tiga indikator sesudah perubahan PK semuanya dalam Kategori **Sangat Tinggi** dengan Skala nilai capaian kinerja $\geq 90,1$. Indikator sebelum perubahan adalah AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi), Prevalensi Gizi Buruk, Rasio rumah sakit Per 100.000 penduduk dan Persentase Puskesmas terakreditasi. Untuk indikator setelah perubahan meliputi Cakupan Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar, Cakupan Penanganan Penyakit menular dan tidak menular dan Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar terakreditasi.

Realisasi dan Capaian Anggaran

Total anggaran yang tersedia untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019 sebesar Rp 121.843.251.523. Dana yang terealisasi sebesar Rp. 115.781.318.648 maka capaiannya sebesar 95,02 % dari anggaran tersebut. Untuk Puskesmas Pagu anggaran Rp 151.129.403.771 terealisasi sebesar Rp 141.078.809.314 sehingga capaiannya sebesar 93,35 %

DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH I

KATA PENGANTAR ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

IKHTISAR EKSEKUTIF III

DAFTAR ISI IV

DAFTAR TABEL V

DAFTAR GAMBAR VI

DAFTAR LAMPIRAN.....VII

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1

 B. VISI DAN MISI KABUPATEN DEMAK.....4

PERENCANAAN KINERJA 8

BAB III 14

AKUNTABILITAS KINERJA.....14

 A. CAPAIAN KINERJA 14

 B. REALISASI ANGGARAN 27

BAB IV 29

PENUTUP 29

 A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN 29

 B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG 29

LAMPIRAN VIII

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Ketenagaan Dinas Kesehatan Per Desember Tahun 2019 3

Tabel 1. 2 Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Per
Desember Tahun 2019.....3

Tabel 2. 1 Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan 9

Tabel 2. 2 DAK Fisik Dan Non Fisik Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Kabupaten Demak
Tahun 2019 9

Tabel 2. 3 Program/ Kegiatan dan Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan
Kabupaten Demak Tahun 2019 10

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja LKJiP 14

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019, 2018, 2017 Target Akhir Renstra Th.2021 15

Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Propinsi Jawa Tengah dan Nasional
.....23

Tabel 3. 4 Efisiensi Dan Efektifitas Capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019 26

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019.....27

Tabel 3. 6 Capaian Realisasi Anggaran DANA DAK Fisik ,Non Fisik Dinas Kesehatan dan
Puskesmas Tahun 2019 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Demak 2

Gambar 3. 2 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Demak 17

Gambar 3. 3 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Demak Tahun 2014 – 2019 18

Gambar 3. 4 Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Demak 20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019 VIII

Lampiran 2 Foto - foto Kegiatan dalam Mencapai Kinerja Tahun 2019 XI

Lampiran 3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019 XIII

Lampiran 4 Prestasi Dinas Kesehatan Tahun 2019 XXVI

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terletak di jalan Sultan Hadiwijaya No. 44 Desa Mangunjiwan Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan dibantu oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), dan Laboratorium Kesehatan (Labkesda).

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

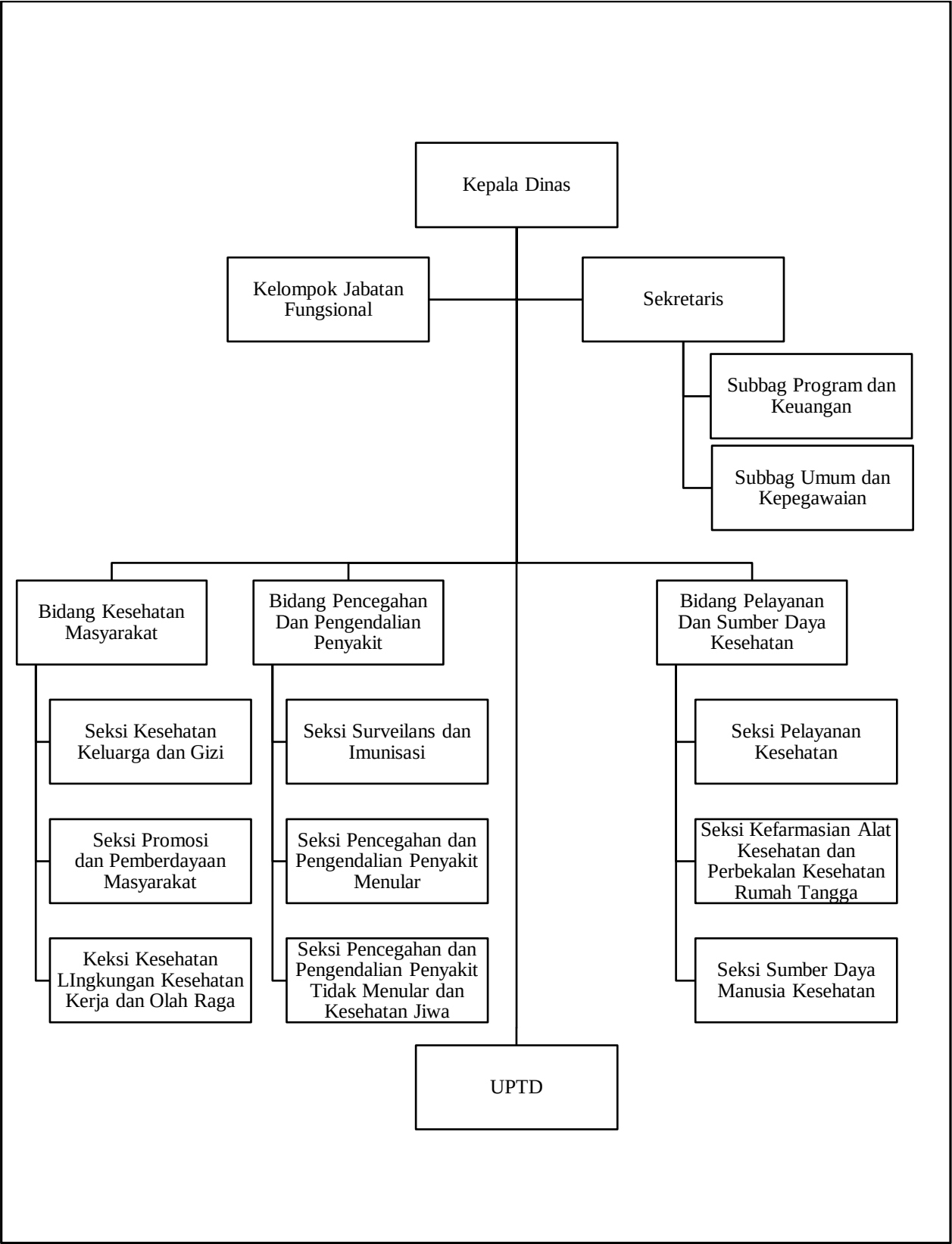
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan,

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan kabupaten Demak mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Untuk mengetahui Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Demak dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

Berdasarkan gambar 1.1 diatas Dinas Kesehatan Kabupaten Demak terdiri dari Sekretariat dan tiga bidang serta kelompok jajabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak didukung oleh sumber daya manusia berdasarkan tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Ketenagaan Dinas Kesehatan Per Desember Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI 2019
1	Pegawai berdasarkan kualitas pendidikan	
	a. SD	3
	b. SMP	17
	c. SMA	100
	d. Sarjana Muda (D I – D III)	417
	e. S1 dan DIV	402
	f. S2	30
J u m l a h		969
2	Pegawai berdasarkan pangkat / golongan	
	a. Golongan I	5
	b. Golongan II	283
	c. Golongan III	586
	d. Golongan IV	95
J u m l a h		969
3	Pegawai berdasarkan jabatan	
	a. eselon II	1
	b. eselon III	4
	c. eselon IV	39
	d. staf	309
4	Pejabat fungsional	616
J u m l a h		969

Dinas Kesehatan memiliki sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Demak terlihat dalam tabel 1.2 berikut

Tabel 1. 2 Data Sarana dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Per Desember Tahun 2019

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah		Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak berat
1	Puskesmas Rawat Inap	15	Unit	15	-	-	-
2	Puskesmas Non Rawat Inap	12	Unit	12	-	-	-
3	Puskesmas Pembantu (Pustu)	47	Unit	28	6	7	6
4	Ambulance	39	Unit	-	-	-	-
5	Puskesmas Keliling	15	Unit	-	-	-	1
6	Mobil jenazah	5	Unit	-	-	-	-

Aset

Jumlah Aset yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Per 31 Desember 2019 sebesar Rp 76.673.259.147,60 terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

1. Tanah

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Per 31 Desember 2019 mencatat aset tanah sebesar Rp 703.800.000,00

2. Peralatan dan Mesin

Per. 31 Desember 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Demak membukukan Aset peralatan dan mesin sebesar Rp 67.433.970.617,96 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Alat-alat besar Rp. 737.860,00
- b. Alat-alat angkutan sebesar Rp. 5.729.726.145,00;
- c. Alat-alat bengkel dan alat ukur sebesar Rp. 31.131.381,00
- d. Alat-alat pertanian/ peternakan sebesar Rp. 186.512.199,00
- e. Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp 10.751.897.944,35;
- f. Alat studio dan komunikasi sebesar Rp 643.716.258,00.
- g. Alat kedokteran sebesar Rp. 47.007.871.922,61;
- h. Alat laboratorium sebesar Rp 2.887.831.908,00.
- i. Alat-alat keamanan sebesar Rp. 194.545.000,00

3. Gedung dan Bangunan

Per. 31 Desember 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak membukukan Aset gedung dan bangunan sebesar Rp 8.400.890.959,64

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per. 31 Desember 2018, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak membukukan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 132.897.570,00. Terdiri dari Bangunan air/ Irigasi sebesar 122.978.570,00, intalasi sebesar Rp 6.919.000,00 dan jaringan sebesar Rp. 3.000.000,00

5. Aset Tetap lainnya

Per 31 Desember 2018,Dinas Kesehatan Kabupaten Demak membukukan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 1.700.000.

6. Kontruksi dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2018 Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tidak memiliki asset kontruksi dalam pengerjaan.

B. VISI DAN MISI KABUPATEN DEMAK

1. Visi

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai.

Visi Kabupaten Demak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah :

Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”

Visi tersebut diatas terdiri dari 8 frase

a. Masyarakat Demak yang Agamis

Kondisi masyarakat yang didalamnya tertanam nilai-nilai agama yang melekat pada setiap perilaku warga, ditambah dengan simbol-simbol keagamaan secara substansial yang melekat pada setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

b. Masyarakat Demak yang Sejahtera

Terpenuhinya dua kriteria hidup masyarakat :

Pertama, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan.

Kedua, terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya buah sistem ekonomi semata; melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya dan sistem sosial.

c. Masyarakat Demak yang Mandiri

Meningkatnya kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan kewenangannya, serta menciptakan kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola potensi dirinya sendiri

d. Masyarakat Demak yang Maju

Masyarakat Demak yang mampu membawa daerahnya berada di depan dibanding daerah-daerah lain dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, keagamaan dan berbagai sendi kehidupan lainnya dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan serta mengedepankan potensi dan kearifan lokal;

e. Masyarakat Demak yang Kompetitif

Fokus pada pengelolaan potensi sumber daya alam, didukung oleh kemampuan sumberdaya manusia yang baik, sehingga mampu menghasilkan dan mengembangkan potensi daerah yang berkualitas serta memiliki daya saing tinggi sekaligus dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

f. Masyarakat Demak yang Kondusif

Masyarakat Demak yang memiliki Daerah dengan situasi aman, nyaman yang mendukung untuk berinvestasi, disertai kualitas pelayanan aparatur yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

g. Masyarakat Demak yang Berkepribadian

Kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat dalam bentuk perilaku. Perilaku tersebut secara keseluruhan didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Nilai-nilai yang mendasari kepribadian tersebut antara lain nilai-nilai agama yang diyakini, nilai sosial, moral, etika dan estetika sehingga menjadi karakter atau kepribadian masyarakat.

h. Masyarakat Demak yang Demokratis

Mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih mengedepankan pada pelayanan yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang berupa persamaan hak dan kewajiban, serta mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat.

Misi pertama ini mengandung pengertian bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, nilai-nilai agama menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Keberhasilan misi yang pertama ini ditandai dengan berkurangnya kasus konflik antar umat beragama dan Tidak adanya Keberadaan aliran yang menyimpang dari nilai nilai agama

b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel mengandung arti bahwa pelaksanaan tata kelola dimulai dengan melakukan penataan reformasi birokrasi, penyusunan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel, memberikan pelayanan yang mudah.

c. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi local serta mengurangi tingkat pengangguran. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan sumberdaya pertanian, perikanan, usaha kecil menengah, mengembangkan industri pengolahan, perdagangan dan jasa yang mampu menyerap tenaga kerja.

- d. Mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, kewilayahan dan meningkatkan keteRpaduan perkembangan kota dan desa. Melakukan pembangunan infrastruktur secara merata baik kota maupun desa sehingga semua masyarakat mampu mengakses semua tempat tempat pelayanan umum.
 - e. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan sesuai standar serta perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Melaksanakan pembangunan pendidikan dasar sehingga semua anak usia sekolah dasar dapat menikmati bangku sekolah, melaksanakan pelayanan kesehatan secara adil dan merata, melaksanakan rehabilitasi, perlindungan dan pemberdayaan bagi PMKS dan penduduk miskin.
 - f. Menciptakan keamanan ketertiban dan lingkungan masyarakat yang kondusif.
Mewujudkan Kabupaten Demak yang aman, tertib yang mampu mananganipermasalahan penyakit masyarakat dan mampu melakukan penanganan dan antisipasi bencana baik bencana alam maupun bencana sosial.
 - g. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, mengembangkan prestasi olahraga, meningatkan peran perempuan dalam pembangunan, mengurangi kasus kekerasan perempuan dan anak, menjaga kelestarian seni dan budaya serta mampu mengendalikan jumlah pendudk dengan menekan jumlah kelahiran.
 - h. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan investasi dengan mempermudah pelayanan perijinan, mewujudkan kota pintar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - i. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan sumberdaya alam. Mengurangi pencemaran lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan kota dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang memberikan dampak terhadap lingkungan.
- Dari Visi dan Misi Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Demak, Dinas Kesehatan mengambil peran yaitu pada **Misi** Meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar dengan **Tujuan** Meningkatkan kulitas derajat kesehatan masyarakat dan Dengan **sasaran** Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja melalui **Perjanjian Kinerja**, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang *seharusnya* terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2. 1 Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Demak Tahun 2019 Sebelum dan Sesudah Perubahan**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2019
1	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	Indikator Sebelum Perubahan		
			Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 klh	102
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1000 klh	7,1
			Prevalensi Gizi Buruk	%	1,2
			Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	per 100.000 penduduk	0,358
			Persentase Puskesmas terakreditasi	%	100
			Indikator Sesudah Perubahan		
			Cakupan Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar	%	100
			Cakupan Penanganan Penyakit menular dan tidak menular	%	100
			Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar terakreditasi	%	100

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun Anggaran 2019, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Demak telah melaksanakan 4 program rutin dan 15 program wajib bidang kesehatan dengan 70 kegiatan yang didukung oleh anggaran APBD Kabupaten Sebesar Rp 121.843.251.523,- Yang terdiri belanja tidak langsung Rp. 4.705.649.313,- dan belanja langsung Rp. 117.137.602.210,- sedangkan anggaran untuk Puskesmas sebesar Rp. 151.129.403.771 terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 69.139.498.045,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 81.989.905.726,-

Dari keseluruhan anggaran APBD tersebut terdapat anggaran bersumber APBN pusat dengan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbagi menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik terdiri dari Pelayanan Dasar dan Farmasi. Untuk mengetahui besarnya DAK fisik dan non fisik Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Demak Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

**Tabel 2. 2 DAK Fisik Dan Non Fisik Dinas Kesehatan Dan Puskesmas
Kabupaten Demak Tahun 2019**

DANA DAK	DINAS	PUSKESMAS	TOTAL
DAK Fisik	9.542.894.986	0	9.542.894.986
dasar	4.108.848.986	0	4.108.848.986
farmasi	5.434.046.000	0	5.434.046.000
Non fisik	6.067.000.000	75.956.543.726	82.023.543.726
Total	15.609.894.986	75.956.543.726	91.566.438.712

Untuk mengetahui besarnya anggaran yang direncanakan dari setiap program dan kegiatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2. 3 Program/ Kegiatan dan Alokasi Anggaran Belanja
Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019**

No	Nama Program / Kegiatan	Pagu Dana (Rp)
1	2	3
	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.112.490.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	267.990.000
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	112.660.000
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100.000.000
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000
7	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	108.000.000
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32.000.000
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	76.500.000
11	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.840.000
13	Penyediaan makanan dan minuman	56.500.000
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000
15	Penyediaan jasa pegawai non PNS	1.090.000.000
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	77.170.000
16	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.000.000
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	74.170.000
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000
19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	13.000.000
20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	130.990.000
21	Pendidikan dan pelatihan formal	125.990.000

22	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	5.000.000
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95.000.000
23	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	45.000.000
24	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000
	Program obat dan perbekalan kesehatan	8.336.537.460
25	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.211.537.460
26	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	100.000.000
27	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin	5.000.000
28	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	10.000.000
29	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	5.000.000
30	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.000.000
	Program upaya kesehatan masyarakat	11.802.277.000
31	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	204.385.000
32	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	2.320.339.000
33	Revitalisasi sistem kesehatan	55.000.000
34	Peningkatan kesehatan masyarakat	2.959.191.000
35	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Operasional Puskesmas	230.000.000 6.033.362.000
	Program pengawasan obat dan makanan	41.738.000
36	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	7.000.000
37	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	4.738.000
38	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	5.000.000
39	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	5.000.000
	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	21.981.650.000
40	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	55.000.000
41	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (Puskesmas)	3.087.000.000 18.312.000.000
42	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	3.000.000

43	Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	524.650.000
	Program perbaikan gizi masyarakat	4.321.749.000
44	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	6.250.000
45	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	25.000.000
46	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	4.255.499.000
47	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	25.000.000
48	Penanggulangan Gizi-Lebih	10.000.000
	Program pengembangan lingkungan sehat	170.000.000
49	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	150.000.000
50	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	10.000.000
51	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	10.000.000
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.301.352.000
52	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	71.700.000
53	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	12.000.000
54	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.036.952.000
55	Peningkatan imunisasi	60.200.000
56	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	120.500.000
	Program standarisasi pelayanan kesehatan	1.100.000.000
57	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	1.100.000.000
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	89.651.529.476
58	Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin (Puskesmas)	17.500.594.750 57.644.542.726
59	Pelayanan kesehatan masyarakat miskin kuota JKN (Peserta PBI)	8.549.036.000
	Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarpras puskesmas/pustu dan jaringannya	2.379.800.000
60	Pembangunan puskesmas	1.025.000.000
61	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1.354.800.000
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	50.084.225.000

62	Pembangunan rumah sakit	50.084.225.000
	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	5.000.000
63	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	5.000.000
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	48.000.000
64	Penyuluhan kesehatan anak balita	25.000.000
65	Immunisasi bagi anak balita	13.000.000
66	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	10.000.000
	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	10.000.000
67	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	10.000.000
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5.378.000.000
68	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	18.000.000
69	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	30.000.000
70	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	5.330.000.000
Jumlah		199.127.507.936

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Kinerja LKJiP

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi
3	$65,1 \leq 75$	Sedang
4	$50,1 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan dua cara, yaitu :

1. Pada indikator Positif, Semakin tinggi realisasi dibandingkan target menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus perhitungan berikut :

$$\text{pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Pada Indikator negatif, Semakin rendah realisasi dibandingkan target maka menunjukkan semakin tinggi pencapaian kinerja, maka digunakan rumus perhitungan sebagai berikut : $\text{pencapaian kinerja} = \frac{\text{Target}-(\text{Realisasi}-\text{target})}{\text{Target}} \times 100 \%$

1. Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019, 2018, 2017 Target Akhir Renstra Th.2021

Pada Tahun 2019, Dinas kesehatan Kabupaten Demak telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan dan tanggung jawab Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019 dengan

mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan, guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan pada tahun tersebut.

Sasaran : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran tersebut, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2019, 2018, 2017 Target Akhir Renstra Th.2021

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian 2019	% Capaian 2018	% Capaian 2017	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Th.2021
Sebelum Perubahan							
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	103 /100.000 KLH	62,57 /100.000 KLH	138,66	91,01	154,99	87,74
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	7,1/1000 KLH	5,3/1000 KLH	125,35	119,58	114,29	118,43
3	Prevalensi Gizi Buruk	1,2 %	0,032 %	197,33	183,08	138,30	178,00
4	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,358 /100.000 penduduk	0,344 /100.000 penduduk	96,09	72,63	98,13	72,63
5	Persentase Puskesmas terakreditasi	100 %	100 %	100	128,58	190,04	100,00
Rata - rata capaian				131,49	118,97	139,15	111,36
Selisih tahun 2019 dengan 2018, 2017 dan Target Akhir Renstra Th.2021					12,52	7,66	20,13
Sesudah Perubahan							
1	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %
2	Cakupan Penanganan Penyakit menular dan tidak menular	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %
3	Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar terakreditasi	100 %	100 %	100 %	-	-	100 %
Rata - rata capaian				100 %	-	-	100 %
Selisih tahun 2019 dengan Target Akhir Renstra Th.2021							0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan**, dari 5 indikator kinerja yang sebelum perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 terlihat bahwa terdapat satu indikator kinerja yang belum memenuhi target yang ditentukan yaitu indikator Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk. Walaupun tidak memenuhi target, tetapi capaiannya sudah lebih dari 90 % sehingga menurut Permendagri 54 Tahun 2010 tetap masuk kategori capaian **sangat tinggi**. Persentase Capaian kinerja berdasarkan Indikator diatas bila dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2017 menunjukan **kenaikan** dengan selisih 12,52% dan 7,66%. Untuk indikator sesudah perubahan semuanya telah tercapai dan tidak ada selisih dengan target renstra karena semua tercapai 100%.

Pencapaian kinerja masing masing indikator tergambarkan pada uraian berikut :

Pencapaian Kinerja Sebelum Perubahan:

a. AKI (Angka kematian Ibu)

AKI (Angka kematian Ibu) adalah Kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain per 100.000 kelahiran hidup.

AKI dipengaruhi berbagai faktor diantaranya status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik selama kehamilan serta kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang kurang optimal oleh masyarakat.

Resiko kematian ibu terkait erat dengan kondisi anemia masa kehamilan. Berdasarkan data yang ada bahwa kejadian Anemia ibu hamil Tahun 2019 dikabupaten Demak mencapai 1500 ibu anemia dari 22.374 ibu hamil atau (6,7%) ibu hamil mengalami anemia. Disamping beresiko pada proses kehamilan, saat persalinan dan masa nifas, ibu hamil anemia juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan.

Faktor utama terjadinya kematian ibu adalah :

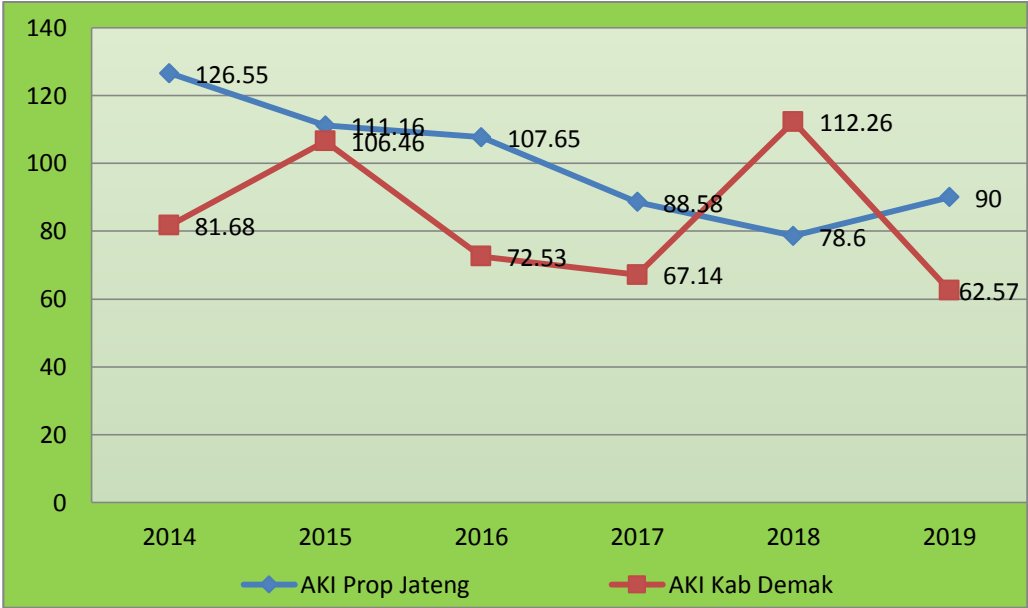
- 1) Terlalu Muda (Umur Kurang 20 Tahun)
- 2) Terlalu Tua (umur Lebih 35 Tahun)
- 3) Terlalu Dekat Jarak Kehamilan (Kurang dari 2 tahun)
- 4) Terlalu Sering Melahirkan (Lebih dari 3 Kali)
- 5) Terdapat Penyakit Penyerta.0

Kemudian faktor 3 terlambat yaitu :

- 1) Terlambat mengambil keputusan
- 2) Terlambat Mencapai Tempat Pelayanan
- 3) Terlambat mendapat Pelayanan Yang Adekuat

AKI merupakan indikator negatif yang artinya semakin kurang dari target menunjukkan capaian kinerja baik. AKI kabupaten Demak Tahun 2019 sebesar 62,57 per 100.000 kelahiran hidup yaitu sebanyak 13 kasus kematian maternal diantara 20.778 kelahiran hidup. Apabila di bandingkan dengan tahun 2018 112,26 dan tahun 2017 sebesar 67,14 per 100.000 kelahiran hidup. Maka di Tahun 2019 angka kematian ibu mengalami penurunan. Demikian juga apabila dibanding target akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yaitu sebesar 100/ 100.000 Kelahiran Hidup. Apabila dibandingkan dengan capaian AKI Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2019 yang 90/ 100.00 KLH maka dapat di simpulkan bahwa capaian AKI Kabupaten Demak mengalami penurunan. Berdasar perhitungan kriteria penilaian realisasi kinerja menunjukkan capaian kinerja 138,66 % yang apabila disandingkan dengan kriteria penilaian maka melebihi 90,1 yang artinya capaian kinerja dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Berikut grafik AKI Kabupaten Demak disandingkan dengan AKI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019:



Gambar 3. 2 Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Demak Tahun 2014 - 2019

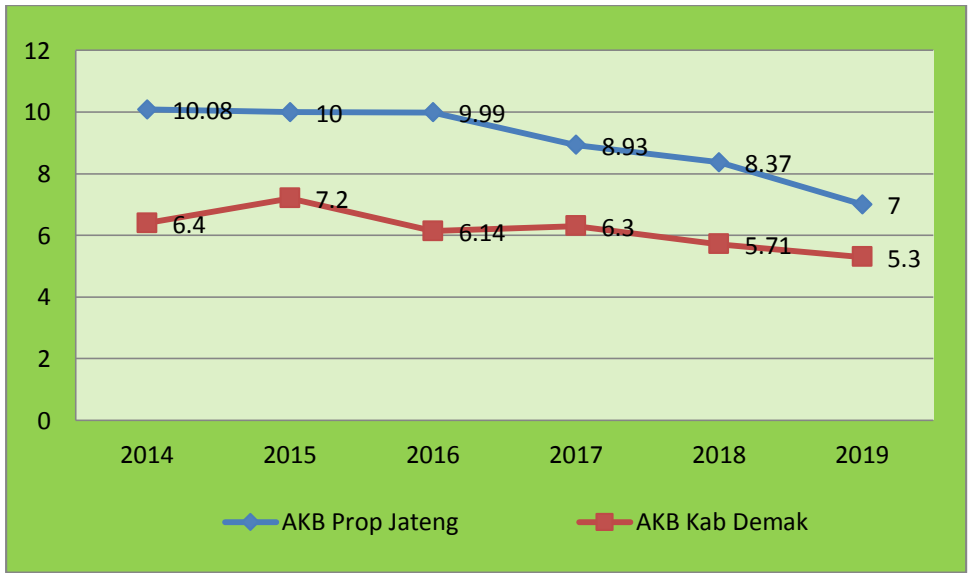
Dari garafik 3.1 diatas menunjukkan bahwa AKI fluktuatif dan mengalami peningkatan ditahun 2018. Akan tetapi, atas upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak antara lain upaya pelayanan antenatal yang sesuai standar, pelayanan persalinan dengan tenaga kesehatan yang berkompetensi, pelayanan masa nifas yang sesuai standar serta sistem rujukan resiko tinggi yang lebih baik. Disamping itu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ibu hamil dan keluarga dalam proses kehamilan dan persalinan sehingga bisa menurunkan AKI di Tahun 2019.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. AKB merupakan jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.

Indikator AKB adalah indikator negatif yang apabila kurang dari target yang ditetapkan maka menunjukkan kinerja baik. Kasus kematian bayi di Kabupaten Demak tahun 2019 sebanyak 111 bayi. Sedangkan jumlah kelahiran hidup tahun 2019 sebanyak 20.778 Kelahiran Hidup. Jadi Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Demak pada tahun 2019 adalah sebesar 5,3 /1.000 kelahiran hidup. Angka ini turun 0,59 / 1000 kelahiran hidup bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang 5,71/1000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja bila dibandingkan tahun sebelumnya. Maka dapat di simpulkan bahwa kinerja dalam penurunan AKB Kabupaten Demak yang mencapai 125,35 dalam kategori **Sangat tinggi**.

Berikut adalah grafik Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Demak disandingkan dengan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2019 :



Gambar 3. 3 Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Demak Tahun 2014 – 2019

Banyak faktor yang menyebabkan kematian bayi diantaranya adalah tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Penyebab kematian bayi terbanyak adalah karena BBLR sejumlah 33, kemudian kelainan kongenital sejumlah 14, asfiksia 9, pneumonia 7, diare 3, sepsis 1, kelaianan saluran cerna 2,

dan penyebab lain seperti penyakit infeksi dan penyakit non infeksi sejumlah 48 kematian.

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir yang meliputi antara lain kunjungan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.

c. Prevalensi Gizi Buruk

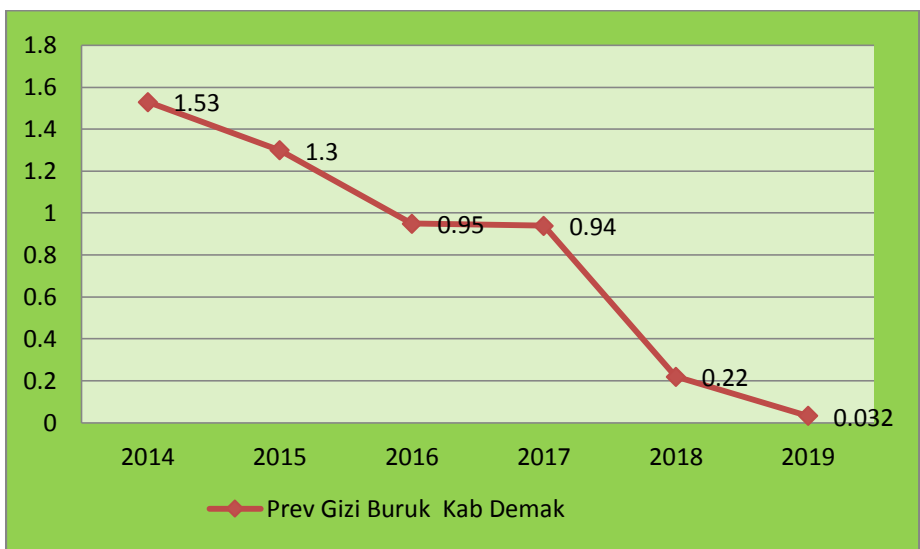
Prevalensi Gizi Buruk adalah salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat yang menunjukkan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan yang ada. Permasalahan gizi dimasyarakat sampai saat ini masih tetap ada, diantaranya adalah masalah gizi buruk dan gizi kurang meskipun dari waktu ke waktu cenderung mengalami penurunan. Gizi buruk dan gizi kurang sangat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, kejadian penyakit serta pengetahuan masyarakat yang kurang tentang pentingnya asupan makanan dengan Gizi seimbang. Gizi kurang cenderung berada pada daerah sosial masyarakat yang rawan. Daerah hal tersebut disebabkan asupan gizi masyarakat masih kurang, terjadinya penyakit infeksi, pola asuh balita tidak baik, kemiskinan, dan pengetahuan yang kurang. Untuk mengatasi daerah sosial masyarakat yang rawan gizi kurang berbagai upaya yang telah dilakukan adalah melakukan pemecahan masalah dengan pemberian makanan tambahan, pengobatan, konseling gizi, peningkatan kualitas Posyandu dan peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor.

Prevalensi kasus gizi buruk Kabupaten Demak mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 dengan prevalensi gizi buruk 0,22 % maka ditahun ini capaian prevalensi gizi buruk mengalami penurunan 0,188% . Berdasarkan target prevalensi gizi buruk tahun 2019 sebesar 1,2 % maka menunjukan kinerja yang baik, karena indikator prevalensi gizi buruk bersifat negatif yang artinya semakin rendah dibawah target menunjukan kinerja yang baik. Pengukuran pencapaian kinerja indikator prevalensi

gizi buruk dapat dihitung dengan dengan formulasi : $\frac{1,2-(0,032-1,2)}{1,2} \times 100 \% = 197,33 \%$ berarti kategory penilaian relailisai kinerja **Sangat Tinggi**.

Apabila dibanding target RPJMD atau Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yaitu sebesar < 1,3 % maka dapat di simpulkan bahwa pencapaian indikator prevalensi Gizi buruk Kabupaten Demak Sudah mencapai target yang telah di tetapkan yaitu kurang dari 1,3 %.

Pencapaian prevalensi gizi buruk tersebut merupakan hasil implementasi khususnya upaya perbaikan gizi masyarakat dalam bentuk kegiatan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pemulihan selama 180 hari, perawatan serta pengobatan baik di rumah, di puskesmas perawatan maupun di Rumah Sakit yang di dukung dengan dana Banatuan Operasional Kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS maupun yang bersumber dari APBD Kabupaten Demak. Berikut grafik prevalensi gizi buruk Kabupaten Demak tahun 2014 – 2109 :



Gambar 3. 4 Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Demak Tahun 2014 – 2019

d. Rasio Rumah Sakit Per 100.000 penduduk

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan gawat darurat.

Berdasarkan data sasaran kementrian kesehatan Republik indonesia yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/ 117/2015, jumlah penduduk kabupaten Demak tahun 2019 adalah sebanyak 1.162.805 jiwa sehingga rasio kebutuhan rumah sakit per 100.000 penduduk adalah empat Rumah Sakit. Jika saat ini Rumah Sakit yang tersedia di Kabupaten Demak sudah empat rumah sakit maka apabila dikategorikan realisasi pencapaian kinerja mancapai 96,09% yang berarti dalam kategori **Sangat Tinggi**.

e. Persentase Puskesmas terakreditasi

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan. Akreditasi Puskesmas merupakan upaya bersama dalam peningkatan mutu Puskesmas dan peningkatan kapasitas pegawai puskesmas yang bermuara pada perbaikan pelayanan kepada pelanggan.

Pada tahun 2019 sudah 27 puskesmas telah terakreditasi atau 100 % dari 27 puskesmas sudah terakreditasi, bila dibandingkan dengan target RPJMD Persentase Puskesmas terakreditasi 100 % maka capaian kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan. Sehingga realisasi pencapaian kinerjanya mencapai 100 % yang berarti dalam kategori kinerja **Sangat Tinggi**.

Pencapaian Kinerja sesudah perubahan

a. Cakupan Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan maka Pelayanan Kesehatan Ibu dan anak minimal harus memenuhi:

- 1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Pelayanan kesehatan balita;

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak telah berupaya melaksanakan pelayanan sesuai SPM hak ini terbukti dengan capaian indikator sasaran tahun 2019 sebesar 100% yang artinya masuk kategori **capaian sangat tinggi**.

b. Cakupan Penanganan Penyakit menular dan tidak menular

Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Untuk Penanganan Penyakit menular dan tidak menular standar pelayanannya adalah:

- 1) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 2) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 3) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

- 4) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- 5) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).
- 6) Pelayanan kesehatan orang terduga kusta

Tahun 2019 capaian indikator sasaran penanganan penyakit menular dan tidak menular Dinas Kesehatan Kabupaten Demak telah mencapai 100% berarti masuk kategori **capaian sangat tinggi**.

c. Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar terakreditasi

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan. Akreditasi Puskesmas merupakan upaya bersama dalam peningkatan mutu Puskesmas dan peningkatan kapasitas pegawai puskesmas yang bermuara pada perbaikan pelayanan kepada pelanggan.

Pada tahun 2019 sudah 27 puskesmas telah terakreditasi atau 100 % dari 27 puskesmas sudah terakreditasi, bila dibandingkan dengan target RPJMD Persentase Puskesmas terakreditasi 100 % maka capaian kinerja sudah melebihi target yang ditetapkan. Sehingga realisasi pencapaian kinerjanya mencapai 100 % yang berarti dalam kategori kinerja **Sangat Tinggi**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Propinsi Jawa Tengah dan Nasional

Capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019 dibanding standar Propinsi Jawa tengah dan standar nasional Dinas Kesehatan telah **mencapai** target terbukti dengan hampir semuanya lebih dari atau sama dengan 100%. Berarti capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019 baik secara standar Propinsi Jawa tengah dan standar nasional termasuk **kategori sangat tinggi**. Untuk lebih mengetahui capaian tiap indikator dibanding dengan standar Propinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3 Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar
Propinsi Jawa Tengah dan Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 Sebelum Perubahan								
		Satuan	Kab Demak	Propinsi Jawa Tengah	Nasional	Capaian 2019	Capaian terhadap Propinsi	Capaian terhadap Nasional
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KLH	62,57	90	306	138,66	130,48	179,55
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	/1000 KLH	5,3	7	8,1	125,35	124,29	134,57
3	Prevalensi Gizi Buruk	%	0,032	0,04	1,7	197,33	120,00	198,12
4	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	/100.000 penduduk	0,358	-	-	96,09	-	-
5	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019 Sesudah Perubahan								
1	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100
2	Penanganan Penyakit menular dan tidak menular	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar terakreditasi		100	100	100	100	100	100

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi Yang Telah Dilakukan

Identifikasi permasalahan dilakukan dengan mendasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan meliputi sebagai berikut:

Permasalahan yang berkaitan dengan managerial Dinas Kesehatan:

- a. Semua Puskesmas belum memiliki tenaga IT, tenaga keuangan dan administrasi. Selama ini kegiatan keuangan dan pelaporan masih dirangkap.
- b. Masih kurangnya Jumlah dan kualitas tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk
- c. Belum diberdayakannya tenaga fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan
- d. Kurang disiplinnya aparatur dalam pelaksanaan tugas

- e. Kurangnya pemahaman aparatatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Masih belum optimalnya kerjasama lintas sektoral dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan

Permasalahan berkaitan dengan kebijakan teknis bidang Kesehatan :

- a. Belum optimalnya pelayanan KIA, karena kurangnya kapasitas tenaga bidan dan tenaga medis PONEB, serta masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak
- b. Tingginya penyakit tidak menular dikarenakan kurangnya deteksi dini dan belum Optimalnya Posbindu
- c. Tingginya Penyakit menular dikarenakan buruknya perilaku hidup bersih dan sehat.
- d. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan rujukan dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif.
- e. Belum optimalnya pelayanan disarana Pelayanan kesehatan dasar di FKTP yang berorientasi promotif dan preventif.

Solusi Yang Telah Dilakukan

a. Strategi

- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi tenaga bidan desa dan tenaga PONEB, peningkatan pengetahuan keluarga dengan Ibu Maternal, Penyediaan rumah tunggu kelahiran (RTK) di dekat fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil yang akan bersalin
- 2) Meningkatkan pelayanan kesehatan Balita melalui peningkatan pola asuh, peningkatan pengetahuan petugas
- 3) Peningkatan cakupan ASI Eksklusif melalui penegakan peraturan, penyediaan pojok laktasi dan peningkatan pemahaman masyarakat, Meningkatkan status gizi balita melalui pemberian makanan tambahan pada balita dengan berat badan di bawah garis merah (BGM) dan penderita gizi buruk, peningkatan deteksi dini tumbuh kembang anak pada PAUD, KB dan Posyandu
- 4) Menurunkan kasus penyakit menular melalui peningkatan penemuan, peningkatan kualitas lingkungan, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), meningkatkan kualitas lingkungan melalui pemeriksaan kualitas air minum, rumah sehat, akses air bersih, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengolahan makanan (TPM) dan pemucuan jamban.
- 5) Menurunkan kasus penyakit tidak menular melalui deteksi dini, pembentukan Posbindu, peningkatan UKBM.
- 6) Penambahan jumlah sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan rujukan dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif, mewujudkan total coverage jaminan

pemeliharaan kesehatan melalui pemberian Jamkesmas, jamkesda, kerjasama BPJS

- 7) Peningkatan kualitas pelayanan disarana Pelayanan kesehatan dasar di FKTP yang berorientasi promotif dan preventif dengan standarisasi pelayanan melalui akreditasi Puskesmas. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (perbekes) melalui penyediaan obat dan perbekes serta peningkatan penggunaan obat rasional.

b. Kebijakan

- 1) Penurunan AKI, AKB diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan ANC, PNC dan Peningkatan Kualitas pelayanan Puskesmas PONED, RS PONEK, serta penyediaan RTK.
- 2) Pelayanan kesehatan balita di prioritaskan pada pelayanan deteksi dini tumbuh kembang balita, PAUD, KB.
- 3) Peningkatan ASI Eksklusif diprioritaskan pada peningkatan pengetahuan dan penyediaan saRpras pojok laktasi, Peningkatan status gizi balita diprioritaskan pada deteksi dini tumbang dan perwujudan keluarga sadar gizi (kadarsi).
- 4) Penurunan kasus penyakit menular diprioritaskan pada upaya promotif dan preventif, Peningkatan kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan di prioritaskan pada JAMKESDA Rujukan dan peserta BPJS Non PBI.
- 5) Penurunan kasus penyakit tidak menular diprioritaskan pada upaya promotif dan preventif serta pembentukan Posbindu. Peningkatan kualitas lingkungan diprioritaskan pada pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)
- 6) Pelayanan kesehatan rujukan diprioritaskan pada pembangunan RS baru
- 7) Pelayanan kesehatan dasar diprioritaskan pada perwujudan akreditasi puskesmas dengan Peningkatan kualitas SDM, Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar serta penyediaan obat dan perbekes diprioritaskan pada penggunaan obat yang rasional.

c. Prioritas Daerah

Prioritas Daerah dalam pembangunan bidang kesehatan Tahun 2019 adalah Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat dengan indikator meningkatnya Angka Usia Harapan Hidup menjadi 75,24 tahun.

4. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Sumber Daya

Berdasarkan realisasi anggaran dan realisasi capaian kinerja program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran indikator kinerja utama diluar program rutin maka efisiensi anggaran diformulasikan rumus berikut: efisiensi =
$$\frac{\text{Realisasi biaya pencapaian kinerja}}{\text{Realisasi capaian kinerja}}$$

X 100 %. Capaian bisa dikategorikan **efisien** apabila **nilai kurang dari atau sama dengan 100 %**.

Penghitungan efektifitas kinerja dapat di hitung berdasarkan formulasi sebagai berikut : efektifitas = $\frac{\text{Realisasi capaian kinerja}}{\text{Target capaian kinerja}}$ X 100 %. Capaian dapat dikategorikan **efektif** apabila capaian kinerja **sama dengan atau lebih dari 100%**. Berikut tersaji efisiensi anggaran dan efektifitas capaian kinerja per indikator sasaran dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Efisiensi Dan Efektifitas Capaian Indikator Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian kinerja (%)	Capaian Anggaran (%)	Efisiensi	Efektifitas
Indikator Kinerja Tahun 2019 Sebelum Perubahan					
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	AKI (Angka Kematian Ibu)	138,66	52,01	37,51	138,66
	Angka Kematian Bayi (AKB)	125,35	100	79,78	125,35
	Prevalensi Gizi Buruk	197,33	92,31	46,78	197,33
	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	96,09	98,67	102,68	96,09
	Persentase Puskesmas terakreditasi	100	96,47	96,47	100
Jumlah		657,43	439,46	363,22	657,43
Rata - rata		131,49	87,89	72,64	131,49
Indikator Kinerja Tahun 2019 Sesudah Perubahan					
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	Cakupan Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar	100	90,50	90,50	100
	Penanganan Penyakit menular dan tidak menular	100	94,82	94,82	100
	Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar terakreditasi	100	98,70	98,70	100
Jumlah		300	284,02	284,02	300
Rata - rata		100	94,67	94,67	100

Kesimpulan : Berdasarkan penghitungan efisiensi ditahun 2019 rata – rata sebelum perubahan PK 2019 sebesar 72,64 % dan capaian efiseiensi sesudah PK 2019 sebesar 94,67%. Yang artinya **kurang dari 100% berarti kategori efisien.** Rata – rata capaian kinerja dinas kesehatan sebelum perubahan PK 2019 sebesar 131, 49% dan sesudah perubahan PK 2019 mencapai 100 % yang artinya **sama dengan atau lebih dari 100 %** sehingga dapat dikategorikan **efektif.**

B. REALISASI ANGGARAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak telah melaksanakan 4 program rutin dan 15 program wajib bidang kesehatan dengan 70 kegiatan yang didukung oleh anggaran APBD Kabupaten Sebesar Rp 121.843.251.523,- Yang terdiri belanja tidak langsung Rp. 4.705.649.313,- dan belanja langsung Rp. 117.137.602.210,- sedangkan anggaran untuk Puskesmas sebesar Rp. 151.129.403.771 terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 69.139.498.045,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 81.989.905.726,-

Rincian raealisasi anggaran Belanja langsung dan Tidak langsung Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3. 5 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2019

No	Urusan Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Langsung	73.845.147.358	70.262.662.148	95,15
a	Belanja Pegawai (Dinkes)	4.705.649.313	4.129.181.842	87,75
b	Belanja Pegawai (Puskesmas)	69.139.498.045	66.133.480.306	95,65
2	Belanja Langsung	199.127.507.936	186.596.365.814	93,71
a	Dinas Kesehatan	117.137.602.210	111.756.239.716	95,41
	Belanja Pegawai	6.806.580.000	4.038.189.820	59,33
	Belanja Barang & Jasa	50.908.207.420	49.420.308.500	97,08
	Belanja Modal	59.422.814.790	58.297.741.396	98,11
b	Puskesmas	81.989.905.726	74.840.126.098	91,28
	Belanja Pegawai	33.869.913.072	31.790.982.177	93,86
	Belanja Barang & Jasa	38.252.247.392	34.461.853.388	90,09
	Belanja Modal	9.867.745.262	8.587.290.533	87,02
JUMLAH		272.972.655.294	256.859.027.962	94,10

Dari tabel diatas . Untuk mengetahui lebih terinci Belanja Tidak langsung dan Belanja langsung berdasar program dan kegiatan terlihat pada Lampiran 3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019. Untuk mengetaui capaian tiap indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Dari keseluruhan anggaran APBD tersebut terdapat anggaran bersumber APBN pusat dengan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbagi menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik terdiri dari Pelayanan Dasar dan Farmasi. Untuk mengetahui capaian realisasi anggaran DANA DAK Fisik dan Non Fisik baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Capaian Realisasi Anggaran DANA DAK Fisik ,Non Fisik Dinas Kesehatan dan Puskesmas Tahun 2019

DANA DAK	Dinas Kesehatan			Puskesmas			Total		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
DAK Fisik	9.542.894.986	9.034.756.422	94,68	0	0	0	9.542.894.986	9.034.756.422	94,68
dasar	4.108.848.986	3.662.546.568	89,14	0	0	0	4.108.848.986	3.662.546.568	89,14
farmasi	5.434.046.000	5.372.209.854	98,86	0	0	0	5.434.046.000	5.372.209.854	98,86
Non Fisik	6.067.000.000	5.149.291.522	84,87	75.956.543.726	69.111.536.922	90,99	82.023.543.726	74.260.828.444	90,54
DAK	15.609.894.986	14.184.047.944	90,87	75.956.543.726	69.111.536.922	90,99	91.566.438.712	83.295.584.866	90,97

Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa capaian tertinggi DAK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tahun 2019 adalah DAK Fisik untuk farmasi yaitu sebesar 98,86%. Untuk Puskesmas hanya DAK non fisik dengan realisasi sebesar 90,99%

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Kesehatan kabupaten Demak mempunyai fungsi untuk Penyusunan kebijakan bidang kesehatan, Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan, Pelaksanaan evaluasi, pelaporan bidang kesehatan, dan Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Bupati. Capaian tertinggi Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Demak adalah Prevalensi Gizi Buruk (197,33%) dengan efisiensi 46,78%. Akan tetapi, ada satu Kinerja Utama yang tidak bisa terealisasi 100% yaitu Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk. Capaian Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk sebesar 98,67% merupakan capaian terendah dan efisiensi terendah dibanding yang lain. Walaupun demikian, tetap kategori capaian sangat tinggi karena lebih dari 90%. Memperhatikan uraian dan beberapa data maka dapat dikatakan bahwa Dinas kesehatan Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil (131,49% untuk indikator sebelum perubahan dan 100% untuk indikator sesudah perubahan), dengan kategori **Sangat Tinggi**

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Rencana Strategi yang telah diidentifikasi serta dikaji berdasarkan pengumpulan data bersama Tim Monitoring Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Nomor.440/043.1/2019 tentang penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019 guna meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan Alokasi Pembiayaan Pembangunan Kesehatan melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN
2. Meningkatkan Jumlah, Jenis, Mutu dan Profesionalisme Sumber Daya Tenaga Kesehatan
3. Meningkatkan dan Memantapkan Standar mutu pelayanan
4. Memantapkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat
5. Memantapkan dan Merealisasikan Komitmen Bersama untuk Pembangunan Kesehatan umumnya, dan secara khusus
6. Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau

7. Untuk Indikator Utama Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, diprioritaskan dalam penganggaran dalam APBD Tahun 2019 untuk mempercepat Operasional Rumah Sakit Sultan Fatah di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
8. Dengan terlaksananya Operasional Rumah Sakit Sultan Fatah di Kecamatan Karangawen, diharapkan sebagai strategi pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan secara maksimal di wilayah selatan Kabupaten Demak

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN
Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515
Telepon(0291)-685934 Faksimili (0291)-685934
<http://dinkes.demakkab.go.id>; e-mail:dinkes@dinkes.demakkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
KEPALA DINAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guvrin Heru Putranto, SKM, MM
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : HM. NATSIR
Jabatan : Bupati Demak

Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



HM. NATSIR

Demak, Agustus 2019
PIHAK PERTAMA



Guvrin Heru Putranto, SKM, MM
Pembina Utama Muda / IVC
NIP. 19630429 198703 1 015

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5.378.000.000	APBD
2	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	48.000.000	APBD
3	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	10.000.000	APBD
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.301.352.000	APBD
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.336.537.460	APBD
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan	41.738.000	APBD
7	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	2.379.800.000	APBD
8	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	50.084.225.000	APBD
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.100.000.000	APBD
10	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.802.277.000	APBD
11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	21.981.650.000	APBD
12	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.000.000	APBD
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	170.000.000	APBD
14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	83.694.174.476	APBD
15	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	4.321.749.000	APBD
TOTAL		190.654.502.936	



PIHAK KEDUA

HM. NATSIR

Demak, Agustus 2019

PIHAK PERTAMA



 Guvrin Heru Putranto, SKM, MM

 Pembina Utama Muda / IVC

 NIP. 19630429 198703 1 015

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				Triwulan				Tahunan
				I	II	III	IV	
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	1. Cakupan Pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar	%	25	25	25	25	100
		2. Cakupan Penanganan Penyakit menular dan tidak menular	%	25	25	25	25	100
		3. Persentase sarana pelayanan kesehatan dasar terakreditasi	%	100	100	100	100	100

Lampiran 2 Foto - foto Kegiatan dalam Mencapai Kinerja Tahun 2019



Foto 1: Pendampingan Rumah Gizi Ibu Hamil Di Desa Kenduren Kecamatan Wedung November 2019



Foto 2: Pembinaan Model Percontohan Sekolah Sehat di MIN Kedungwaru Lor Bersama Kesra, Kemenag, DinLH, BAPPEDA, DINDIKBUD Agustus 2019



Foto 3: Pemantauan BIAS DT/ TD di SD Ploso November 2019



Foto 4: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Laksanakan Kegiatan Posbindu PTM September 2019



Foto 5: Peninjauan RSUD Sultan Fatah Bersama Kejaksaan Negeri Agustus 2019



Foto 6: Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Sosialisasikan Penanggulangan Keracunan Makanan Juli 2019

Lampiran 3 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan dan Hasil Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun 2019

No.	Nama Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (RP)	Penyerapan Dana		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
			(Rp)	%	Output	Outcome			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Pogram/ kegiatan pada penunjang OPD								
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	2.112.490.000	2.000.956.740	94,72		Persentase Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	3.397.000	84,93	Terpenuhinya jasa surat menyurat		Bulan	12	12
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	267.990.000	253.488.601	94,59	Tercukupinya pengadaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik		Bulan	12	12
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	60.000.000	59.999.360	100	Terlaksanya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		Bulan	12	12
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	112.660.000	109.378.317	97,09	Terlaksanya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Bulan	12	12
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100.000.000	96.506.476	96,51	Tersedianya jasa administrasi keuangan		Bulan	12	12
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.000.000	29.916.800	99,72	Tersedianya jasa kebersihan		Bulan	12	12
7	Penyediaan alat tulis kantor	30.000.000	29.093.500	96,98	Tersedianya alat tulis kantor		Bulan	12	12
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	108.000.000	106.624.000	98,73	Tercukupinya Penyedian barang cetakan dan penggandaan		Bulan	12	12
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	32.000.000	26.206.150	81,89	Terpenuhinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Bulan	12	12
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	76.500.000	59.615.000	77,93	Tercapainya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Bulan	12	12

11	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.000.000	4.643.000	92,86	Tersedianya peralatan rumah tangga		Bulan	12	12
12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.840.000	9.840.000	100	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan		Bulan	12	12
13	Penyediaan makanan dan minuman	56.500.000	56.484.000	99,97	Tersedianya makan dan minuman		Bulan	12	12
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	130.000.000	129.975.000	99,98	Tercapainya Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Bulan	12	12
15	Penyediaan jasa pegawai non PNS	1.090.000.000	1.025.789.536	94,11	Terbayarnya Jasa pegawai Non PNS		Bulan	12	12
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	177.170.000	176.565.720	99,66		persentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100
16	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.000.000	4.999.230	99,98	Tersedianya pemeliharaan rumah dinas		Bulan	12	12
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	74.170.000	74.125.910	99,94	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor		Bulan	12	12
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.000.000	79.448.580	99,31	Tersedianya pemeliharaan kendaraan oprasional		Bulan	12	12
19	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	13.000.000	13.000.000	100	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Bulan	12	12
20	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	5.000.000	4.992.000	99,84	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		Bulan	12	12
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	130.990.000	126.665.000	96,7		persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bagi petugas	%	100	100
21	Pendidikan dan pelatihan formal	125.990.000	121.765.000	96,65	Pelatihan Tenaga fungsional kesehatan		Orang	292	292
22	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	5.000.000	4.900.000	98	Sosialisasi Peraturan Per Undang Undangan tukang Gigi		Kegiatan	2	2

4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95.000.000	94.520.000	99,49		persentase Terwujudnya laporan (Bulanan, tribulanan, semesteran, tahunan) capaian kinerja dan keuangan	%	100	100
23	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	45.000.000	44.870.000	99,71	Tersusunya dokumen laporan keuangan semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya		buku	2	2
24	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000	49.650.000	99,3	Tersusunya 1 buah laporan keuangan SKPD (Laporan realisasi anggaran, Neraca, Catatan atas laporan Keuangan)		buku	4	4
B	Pogram/ kegiatan wajib Kesehatan								
5	Program obat dan perbekalan kesehatan	8.336.537.460	8.240.715.440	98,85		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100	100
25	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	8.211.537.460	8.115.715.440	98,83	Tersedianya Obat dan perbikes		%	100	100
26	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	100.000.000	100.000.000	100	Tersedianya Obat dan perbikes di FKTP tingkat pertama		Puskesmas	27	27
27	Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin	5.000.000	5.000.000	100	Terbinanya sarana yankes dengan penggunaan obat generik dan obat rasional		Sarana	27	27
28	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	10.000.000	10.000.000	100	Terbinanya sarana pelayanan farmasi di puskesmas dan apotek/klinik		Sarana	42	42
29	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	5.000.000	5.000.000	100	Jumlah sarana distribusi farmasi sesuai standart		Sarana	50	50
30	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.000.000	5.000.000	100	Monitoring evaluasi pengelolaan obat pustu/PKD		Sarana	27	27
6	Program upaya kesehatan masyarakat	5.768.915.000	5.285.809.739	91,63		Cakupan Pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	%	100	100

						Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100
31	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	204.385.000	190.508.000	93,21	Jumlah Puskesmas pelayanan medis dasar pada masyarakat		Puskesmas	27	27
32	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	2.320.339.000	2.164.751.950	93,29	Jumlah Puskesmas melakuakn pegelolaan Alkes sesuai standart		Paket	3	3
33	Revitalisasi sistem kesehatan	55.000.000	54.845.000	99,72	Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan		Bulan	12	12
34	Peningkatan kesehatan masyarakat	2.959.191.000	2.651.686.328	89,61	1. Jumlah WUS Yang mengikuti Pemeriksaan IVA		Jiwa	1000	1000
					2. Jumlah Orang mengikuti Sosialisasi Upaya Kesehatan kerja dan Olah raga		Orang	300	300
					3. Jumlah Kasus DM baru ditangani		Kasus	29.877	27.430
					4. Jumlah Kasus ODGJ ditemukan dan ditangani		Orang	250	250
					5. Jumah Kasus hipertensi ditetemukan dan Ditangani		Orang	59.579	59.578
					6. Jumlah Usia Produktif yang dilakukan Screning kesehatan		orang	300	300
35	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	230.000.000	224.018.461	97,4	Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan		Bulan	12	12
7	Program pengawasan obat dan makanan	41.738.000	41.723.000	99,96		Jumlah kasus keracunan makanan (Posoitif laboratoris)	kasus	0	0
36	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	7.000.000	6.995.000	99,93	1. Jumlah masyarakat mengetahui keamanan Pangan		Orang	60	60

37	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	24.738.000	24.728.000	99,96	1. Jumlah Sarana distribusi Manmin sesuai standar		Saran	70	70
					2. Jumlah pelaku usaha memiliki sertifikat		Orang	90	90
					3. Jumlah restaurant dan jasa boga sesuai standar kesehatan		Saran	15	15
					4. Jumlah sarana distribusi obat tradisional sesuai standar		Saran	25	25
38	Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan	5.000.000	5.000.000	100	Jumlah Smapel Manmin diperiksa		Sampel	25	25
39	Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan	5.000.000	5.000.000	100	Jumlah sarana produksi dan distribusi manmin yang disidak		Sarana	30	30
8	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	3.669.650.000	3.622.288.877	98,71		Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	71	82
						Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100
						Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	%	100	100
40	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	55.000.000	55.000.000	100	Jumlah media promosi dan informasi sadar hidup sehat		Media	3	3
41	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	3.087.000.000	3.042.060.927	98,54	Jumlah peserta Penyuluhan kesehatan ttg bahaya rokok di Desa / Kel		Orang	12450	12450
42	Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan	3.000.000	3.000.000	100	Jumlah sosialisasi pemanfaatan Labkesda		Kali	1	1
43	Pembinaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	524.650.000	522.227.950	99,54	Jumlah kegiatan pembinaan dan monitoring prog.promosi kesehatan		Kegiatan	30	30
9	Program perbaikan gizi	4.321.749.000	3.989.241.220	92,31		Prevalensi balita gizi	%	8	5,48

	masyarakat					kurang			
						Prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi	%	9,2	5,48
						Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100
						Persentase Balita ditimbang berat badannya (D/S)	%	88	88,78
						Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	58	65
						Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga Miskin	%	100	100
						Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium	%	87	86,05
						Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	100	100
						Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	98,5	96,15
						Persentase ibu hamil mengalami KEK	%	8,2	7,43
						Persentase Ibu hamil yang anemia	%	8,4	6,7
						Persentase kecamatan bebas rawan gizi	%	92,85	100
44	Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi	6.250.000	6.250.000	100	Tersusunnya dokumen peta rawan gizi		Dokumen	1	1
45	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	25.000.000	24.583.400	98,33	1. Jumlah Bayi/balita dan bumil mendapat PMT		Orang	200	2986

					2. jumlah bumil Mendapat PMT		Bumil	200	1091
					3. jumlah Balita Yang mengalami peningkatan Berat Badan		Balita	79402	71440
46	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	4.255.499.000	3.923.407.820	92,2	1. Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		Balita	30	32
					2. Jumlah ibu hamil Mendapat 90 tablet Besi		Bumil	21000	21512
					3. Jumlah Balita Usia 6-59 bulan mendapat kapsul Vit A		Balita	79402	90704
					4. Jumlah bayi 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif		Bayi	9830	6122
47	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	25.000.000	25.000.000	100	1. Jumlah Rumah gizi terbentuk dalam Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian kadarzi		Rumah	1	14
					2. Jumlah Rumah Tangga Konsumsi garam beryodium		Rumah	200000	197816
48	Penanggulangan Gizi-Lebih	10.000.000	10.000.000	100	Jumlah KP-ASI terbentuk		Lokasi	4	10
10	Program pengembangan lingkungan sehat	170.000.000	170.000.000	100		Cakupan Rumah Sehat	%	85	87,89
						Angka Bebas jentik aedes	%	95	95,26
						Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan	%	85	85,96
						Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	%	87	88,68

49	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	150.000.000	150.000.000	100	Jumlah desa ODF		Desa	95	95
50	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	10.000.000	10.000.000	100	Jumlah pengelola usaha DAM, air bersih, TTU TPM TP3 Mnegikuti Penyuluhan Kesehatan lingkungan		Orang	162	165
51	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	10.000.000	10.000.000	100	Jumlah kader kesehatan di pondok pesantren , petugas kesehatan lingkungan di tempat umum dan layanan kesehatan medapat Sosialisasi Kebijakan Lingkungan sehat		Kader	270	275
11	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.301.352.000	1.266.562.132	97,33		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization	%	100	100
						CakupanDesa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100
						Angka kejadian tuberkulosis (insiden Semua kasus / 100.000 penduduk / tahun)	100.000 penduduk	69	70,88
						Angka kematian tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,2	0,001
						Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	70	100
						Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (Sucses rate)	%	100	100

						Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total Populasi usia 15-49 tahun	%	0,01	0,01
						Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS	%	80	87,2
						Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat ntiretroviral	%	0,01	100
						Angka kejadian malaria Per 100.000 penduduk	/ 10000 penduduk	0,01	0
						Angka kesakitan (IR) Demam Berdarah Dengue Per 100.000 penduduk	/100000 penduduk	< 49	14,8
						Persentase Kematian DBD (CFR)	%	< 1	1,1
						Angka kejadian diare Per 1000 penduduk	%	21,4	21,9
						Persentase kasus filariasis yang ditangani	%	100	100
						Penemuan Acute Flaccid Paralysis (AFP)	Kasus	20	33
						Persentase kasus leptospirosis ditangani	%	100	100
						Jumlah penemuan kasus kusta baru	Kasus	50	74
52	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	71.700.000	55.798.688	77,82	1. Jumlah Fogging Fokus		Focus	10	20
					2. Jumlah Kasus DBD		Kasus	< 564	167
					3. Jumlah kematian Kasus DBD		Kasus	< 6 kasus	2

53	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	12.000.000	11.925.000	99,38	Jumlah anak sekolah mendapat pelayanan imunisasi		Siswa	60256	60121
54	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	1.036.952.000	1.019.238.444	98,29	1. Jumlah kasus IMS ditemukan dan tertangani		kasus	500	20
					2. Jumlah Kasus TBC yang ditemukan dan ditanganinya sesuai standar		Kasus	895	1648
					3. Jumlah penemuan kasus kusta baru		Kasus	50	74
					4. Jumlah kasus HIV/AIDS ditemukan dan ditangani sesuai standar		Kasus	50	51
					5. Jumlah Penduduk minum obat anti filaria		Orang	1.080.179	1.080.179
					6. Jumlah kasus leptospirosis ditemukan dan ditangani		kasus	34	80
					7. Jumlah kasus malaria ditemukan dan ditangani		kasus	30	30
					8. Jumlah kasus filaria yang ditemukan dan ditangani		kasus	6	0
					9. Jumlah kasus diare ditemukan dan ditangani		kasus	23.289	21.964
					10. Jumlah kasus Pneumoni ditemukan dan ditangani		kasus	7.940	3.332
					11. Jumlah kasus Hapatitis ditemukan dan ditangani		kasus	300	485
55	Peningkatan imunisasi	60.200.000	60.200.000	100	Jumlah desa yang UCI desa		desa	249	249
56	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	120.500.000	119.400.000	99,09	1. Jumlah Penemuan kasus Campak klinis		Kasus	20	33
					2. Jumlah Penemuan kasus AFP ditemukan dan ditangani		Kasus	20	33

12	Program standarisasi pelayanan kesehatan	1.100.000.000	1.061.155.595	96,47		Persentase puskesmas yang terakreditasi	%	100 (7 Puskesmas)	100
						Rasio dokter per satuan penduduk Per 100.000 penduduk	%	1,44	33,19
57	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	1.100.000.000	1.061.155.595	96,47	Jumlah Puskesmas Ternilai akreditasi		Puskesmas	7	7
13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	32.006.985.750	30.952.744.337	96,71		Cakupan pelayanan kesehatan dasar penduduk miskin	%	100	100
58	Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	17.500.594.750	17.499.206.337	99,99	Jumlah Masyarakat miskin non kuota BPJS JKN dan miskin serta rentan miskin (SKTM) terlayani Jamkesda		Jiwa	35953	35953
59	Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kuota JKN (peserta PBI)	14.506.391.000	13.453.538.000	92,74	Jumlah Masyarakat miskin non kuota BPJS JKN dan miskin serta rentan miskin (SKTM) terlayani Jamkesda		Jiwa	27561	27561
14	Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarpras puskesmas dan jaringannya	2.379.800.000	2.343.045.600	98,46		Rasio puskesmas persatuan penduduk (per 100.000 penduduk)	%	2,42	2,35
60	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	1.025.000.000	1.005.259.000	98,07	Jumlah paket Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya		unit	1	1
61	Pembangunan Puskesmas	1.354.800.000	1.337.786.600	98,74	Tersedianya tanah aset Puskesmas Guntur 1		Paket	1	1
15	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit	50.084.225.000	49.420.108.406	98,67		Rasio tempat tidur RS persatuan penduduk (per 1.000 penduduk)	%	46,51	61,65
62	Pembangunan Rumah Sakit	50.084.225.000	49.420.108.406	98,67	Terbangunnya Rumah Sakit (RS Operasional)		RS	1	1

16	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	5.000.000	5.000.000	100		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan pemeliharaan Kesehatan	%	95	100
63	kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	5.000.000	5.000.000	100	Jumlah Kemitraan asuransi Kesehatan Masyarakat		Kemitraan	1	1
17	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	48.000.000	48.000.000	100		Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	%	100	100
64	Penyuluhan kesehatan anak balita	25.000.000	25.000.000	100	Jumlah peserta Penyuluhan Kesehatan Anak Balita		Orang	54	54
65	Immunisasi bagi anak balita	13.000.000	13.000.000	100	jumlah baduta yang mendapatkan imunisasi lanjutan MR dan pentavalen		Baduta	20143	18373
66	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	10.000.000	10.000.000	100	Jumlah peserta pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita		Orang	27	54
18	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	10.000.000	10.000.000	100		Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	%	100	100
67	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	10.000.000	10.000.000	100	Terbentuknya Poslansia di Semua Puskesmas		Poslansia	27	312
19	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5.378.000.000	2.797.035.000	52,01		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan(FKTP)	%	100	100
						Cakupan kunjungan bayi	%	99	98,05
						Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	98	96,15
						Cakupan pelayanan nifas	%	100	100
						Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100
						Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100

						Persentase BBLR yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan	%	100	100
68	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	18.000.000	18.000.000	100	Jumlah bumil mengikuti Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu		Bumil	375	375
69	Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu	30.000.000	30.000.000	100	Meningkatnya kesehatan ibu hamil dari keluarga kurang mampu		Bumil	375	375
70	Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu	5.330.000.000	2.749.035.000	51,58	1. Jumlah Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan sesuai standar		Persalinan	20653	20653
					2. Jumlah pelayanan ibu nifas sesuai standar		ibu nifas	20642	20642
					3. Jumlah BBLR yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan		Bayi	662	662
					4. Jumlah tenaga kesehatan terlatih dalam perawatan kesehatan ibu dan anak		Petugas	72	72
					5. Jumlah Kunjungan bayi baru lahir		bayi	20778	20699

Lampiran 4 Prestasi Dinas Kesehatan Tahun 2019

PRESTASI DINKES DEMAK REGIONAL TINGKAT KABUPATEN DEMAK

NO	PRESTASI	TAHUN
1	Juara I Demak EXPO Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2019	2019
2	Juara III Budaya Kerja Dalam Rangka Hari KORPRI Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2019	2019
3	Juara II Tumpeng Dalam Rangka Hari KORPRI Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2019	2019
4	Juara II Foto Dalam Rangka Hari KORPRI Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2019	2019
5	Juara II Memasak Mie tek - Tek Dalam Rangka Hari KORPRI Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2019	2019
6	Juara III Puskesmas Budaya Kerja Sangat Baik oleh Puskesmas Wedung 2 Dalam Rangka Hari KORPRI Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2019	2019
7	Juara I Puskesmas Budaya Kerja Sangat Baik oleh Puskesmas Bonang 2 Dalam Rangka Hari KORPRI Tingkat Kabupaten Demak Tahun 2019	2019

PRESTASI DINKES DEMAK TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PRESTASI	TAHUN
1	Puskesmas Mranggen III sebagai Juara III -Tiga Puskesmas Kawasan Perkotaan dalam Penilaian FKTP Berprestasi Provinsi Jawa Tengah 2019	2019
2	Puskesmas Bonang II sebagai Juara I -Pertama Puskesmas Kawasan Pedesaan dalam Penilaian FKTP Berprestasi Provinsi Jawa Tengah 2019	2019
3	Klinik Rifda Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai Juara I-Pertama Klinik Pratama dalam Penilaian FKTP Berprestasi Provinsi Jawa Tengah 2019	2019
4	Juara I Pertama Tenaga Kesehatan Teladan Untuk Tenaga Kefarmasian Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019 oleh Nur Harjanti, Amd, Farm dari Puskesmas Bonang II	2019
5	Juara III (Tiga) Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019 Kategori Ahli Teknologi Laboratorium Medik a.n Ana Ria Shofa, Am.Ak dari Puskesmas Karangawen II	2019
6	Juara III -tiga Tenaga Kesehatan Teladan Untuk Tenaga Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2019 oleh Indah Kusumawati SKM, M.Kes dari Puskesmas Bonang II	2019

PRESTASI DINKES DEMAK TINGKAT NASIONAL

NO	PRESTASI	TAHUN
1	Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Nasional 2019 Kategori Tenaga Kefarmasian a.n Nur Harjanti, Amd, Farm dari Puskesmas Bonang II	2019